

# **HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR DALAM PANDANGAN**

## **HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI**

(Studi tentang Putusan MA No. 46P/Hum/2018)



### **SKRIPSI**

Skripsi Digunakan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ADI SAPUTRA**

NPM : 1521020003

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr.Alamsyah, S. Ag., M. Ag.

Pembiimbing II : Dr. Liky Faizal S. Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/2019M**

**ABSTRAK**  
**HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR DALAM PANDANGAN HUKUM**  
**ISLAM DAN KONSTITUSI**  
**(Studi tentang Putusan MA No.46P/HUM/2018)**

**Oleh**  
**Adi Saputra**

Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Isi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Agung ini, hak politik mantan koruptor terselamatkan, dan mereka diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Statement negatif muncul dari masyarakat yang menganggap bahwa dengan ditetapkannya putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung berarti memperbolehkan mantan koruptor yang notabennya adalah sosok yang telah berkhianat kepada rakyat dan negara sehingga menurut masyarakat mereka tidak cocok untuk diberi amanah sebagai wakil rakyat.

Dalam Islam, hak politik sejatinya merupakan bagian instrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-hak *dasariahnya*. Demikian pula, hak-hak mereka yang bersifat prinsip harus mendapat perlindungan yang sama. Tidak ada yang dapat memasang dan mereduksi hak-hak dasar yang melekat pada manusia, termasuk hak-hak politik kecuali karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang mengacu secara jelas kepada nilai-nilai etika moral kemanusiaan dan ajaran substansial agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum/2018 tentang Hak politik mantan koruptor dan Bagaimana analisis hukum islam dan konstitusi di Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum/2018 tentang hak politik mantan koruptor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung tentang Hak Politik Mantan Koruptor serta untuk mengkaji pandangan Hukum Islam dan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum/2018 tentang Hak Politik Mantan Koruptor.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yakni menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas, Adapun cara yang ditempuh dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta menyusun data yang diperoleh menurut pokok bahasan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya, *pertama*, berdasarkan hukum Islam Putusan Mahkamah Agung

tersebut telah sesuai karena telah melindungi hak seseorang (hak politik) dalam hal ini adalah mantan koruptor. *Kedua*, putusan Mahkamah Agung membatalkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 pada frasa “korupsi” peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 karena dinilai bertentangan dengan undang-undang dan juga menghilangkan hak politik seseorang. Pembatalan mengakibatkan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ditambah lagi dalam hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut diatas pada frasa “korupsi” tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ  
وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ ءَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلَوْا ءَوْ تُعَرِّضُوا فإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.s. An-Nisaa :135)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departement Agama RI, *Al- Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2011), h. 100.

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Ucapan terima kasihku semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Burhanudin dan Ibunda Yuliyana, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta keikhlasan didalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Nenekku Sofiah dan Adikku tersayang M. Nizam Dwi Saputra, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat yang begitu berharga kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku di UIN Raden Intan Lampung , UKMF GEMAIS, dan Tim Pejantan Tangguh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan dorongan semasa kuliah hingga terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN RADEN INTAN LAMPUNG

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Adi Saputra dilahirkan di Bandarlampung, pada tanggal 14 September 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Burhanudin dan Ibu Yuliyana.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak (TK) Handayani Lampung dan diselesaikan tahun 2003. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 8 Gedong Air hingga 2009. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 16 Bandarlampung, diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasa dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konstitusi (Studi tentang Putusan MA No.46P/Hum 2018)”







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

***Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260***

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : ADI SAPUTRA**

**NPM : 1521020003**

**Program Studi : Siyasah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI  
(Studi tentang Putusan MA Nomor 46P/Hum/2018)**

**MENYETUJUI**

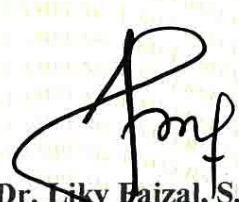
Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Juli 2019


**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Mansyah S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

  
**Dr. Lily Faizal, S. Sos., M.H.**  
**NIP. 197611042005011004**

**Ketua Jurusan Siyasah,**

  
**Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 1971 11061998 03 2005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI** (Studi tentang Putusan MA No. 46P/Hum/2018) Disusun oleh: **ADI SAPUTRA, NPM: 1521020003**, Program Studi: **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal : **Kamis , 12 September 2019**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.	(.....)
Sekretaris	: Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.	(.....)
Penguji Utama	: Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H	(.....)

**Dekan  
Fakultas Syariah**



**Khairuddin, M.H.**  
19621022 199303 1002



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI (Studi tentang Putusan MA Nomor 46P/Hum 2018)” sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan juga Pembimbing I penulis yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos., I., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Frenki.

M.Si., selaku Sekretaris Jurusan, serta Bapak Muhammad Irfan S.H.I., M.Sy, dan Bapak Agus Hermanto S.H.I., M.H.I, selaku pegawai di Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak : Dr. Liky Faizal S. Sos., M.H selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua ayahanda (Burhanudin) dan ibunda (Yuliyana) dan adik-adikku tersayang, yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Keluarga Besar UKMF GEMAIS yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman baikku juga Dias Fatma Sari dan Sahabat-sahabatku angkatan 2015 Siyasah (Hukum Tata Negara), Ahmad Sobari, Alfa Ridho, Ari Sudarman, Rahmatulloh, Teguh Budiono, Oksi Juan Firnando yang telah memberikan motivasi kepadaku, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman umumnya, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandarlampung, 10 Juli 2019  
Penulis

ADI SAPUTRA  
NPM.1521020003



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian.....	10

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

1. Pengertian Hak Politik dan Macamnya .....	13
2. Kemampuan, Syarat dan Faktor Penghapusan Hak Politik dalam Hukum Islam	
a) Pengertian Kemampuan ( <i>Ahliyah</i> ) .....	22
b) Macam-macam Kemampuan ( <i>Ahliyah</i> ).....	23
c) Sebab-sebab Hilangnya Keahlian ( <i>Awarid Ahliyah</i> )	29
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi	
a) Pengertian Konstitusi .....	35



b) Konstitusi di Indonesia .....	36
c) Pengertian , macam Hak dan Kewajiban.....	38
d) Penyebab Hilangnya Hak-hak Warganegara.	41
B. Tinjauan Pustaka .....	51

### **BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, LATAR BELAKANG, ISI DAN ARGUMENTASI**

A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018.....	53
1. Pemohon dan Kepentingan Hukum.....	53
2. Tentang Pokok Perkara .....	56
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	57
B. Pendapat Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Permohonan	61
C. Amar Putusan .....	65

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN**

A. Analisis dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum 2018.....	67
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 Tentang Hak Politik Mantan Koruptor dalam Hukum Islam dan Konstitusi .....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi tentang Putusan MA Nomor 46P/Hum/2018)**.

Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.<sup>2</sup>
2. Mantan adalah bekas (pemangku jabatan, kedudukan, dan sebagainya).<sup>3</sup>
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) tempat kerjanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak –hak politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung : Angkasa, 2005)h. 30.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) , h 876.

<sup>4</sup>*Ibid*, h 73

4. Hukum Islam adalah “peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan rosul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).<sup>5</sup>
5. Konstitusi adalah Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “*Constitution*” dan berasal dari bahasa belanda “*constitue*” dalam bahasa latin (*contitutio, constituere*) dalam bahasa prancis yaitu “*constitue*” dalam bahasa jerman “*vertassung*” dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat suatu negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kalimat diatas maka makna dari judul “Hak Politik Mantan Koruptor Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Konstitusi (Studi tentang Putusan MA Nomor 46P/Hum/2018)” adalah hak mantan koruptor dalam kapasitas nya sebagai seorang anggota organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum untuk menjadi anggota legislatif yang merupakan penduduk sebuah negara, dalam putusan mahkamah agung No.46P/Hum/2018 yang akan dianalisis dalam hukum Islam dan Konstitusi.

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) h 42.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h 96.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Karena terjadi pro dan kontra dalam masyarakat tentang Hak Politik mantan koruptor pasca Putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 yang membolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai legislatif.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum/2018.

### **2. Alasan subyektif**

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penyusun pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
- b. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

## **C. Latar Belakang**

Kepentingan yang paling mendasar dari setiap Negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di



seluruh penjuru dunia.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-undang dasar Negara modern.

Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.<sup>8</sup>

Hak politik juga mengandaikan adanya kesempatan untuk ikut turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian, tidak hanya hak tetapi juga kesempatan. Negara harus menyediakan perangkat yang memberikan kesempatan pada warga negaranya untuk turut serta dalam pemerintahan. Jika negara membuat aturan yang membatasi hak politik warga negara, berarti negara telah mencederai hak asasi warganya.<sup>9</sup>

Dalam konteks berpolitik di Indonesia, Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5)

---

<sup>7</sup> Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) h. 203.

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 123.

<sup>9</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h. 201.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut Lembaga Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum.<sup>10</sup>

Untuk melaksanakan pemilihan umum Lembaga Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana pemilihan umum dan terbentuk dari perintah undang-undang pemilihan umum. Lembaga Komisi Pemilihan Umum sendiri telah membentuk Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tetapi dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sistem norma hukum di Indonesia, sehingga diputuskan bertentangan oleh Mahkamah Agung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Putusan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang isinya “Bahwa mantan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun

---

<sup>10</sup> Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2019”, dan isi substansi pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Bahwa bakal calon DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.”<sup>11</sup>

Berdasarkan dikeluarkannya putusan Nomor 46/P/HUM/2018 sehingga Komisi Pemilihan Umum harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga, bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Pasal 28D (3)

“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>12</sup>

Berarti pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama didalam dan dimata hukum, pemerintahan dan hak politik. Yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali.

---

<sup>11</sup> Pasal 140 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>12</sup> UUD 1945 Pasca Amandemen

Pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Agung muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa Mahkamah Agung abai terhadap etika publik yang menghendaki input demokrasi yang bersih, keinginan publik yang mau menyeleksi sejak awal caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi di legislatif. Kemudian lebih lanjut, Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor maju sebagai caleg dianggap sebagai upaya menyelamatkan lembaga parlemen dari praktik-praktik kotor seperti korupsi.

Teori tentang politik dalam Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama baik di masa lampau atau pun di masa kini. Hal ini mudah dipahami, karena masalah politik termasuk ruang lingkup *ijtihad* yang memungkinkan kepada para ulama untuk mengkaji setiap masa.

Dalam hal ini al-Quran dan al-Sunnah tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai politik. Dalam al-Quran tidak ditemukan konsep tentang politik umat Islam untuk diaplikasikan pada setiap tempat dan zaman. Karena jika hal ini ada, berarti al-Quran menghambat dinamika perkembangan umat. Adalah suatu kebijaksanaan al-Quran untuk membiarkan hal ini dipecahkan oleh nalar manusia sebagai suatu kemampuan dan perkembangan zaman. Kendati demikian al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat.

Hak politik dalam Islam adalah hak hak warga negara dalam negara Islam dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik), hak untuk



mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.<sup>13</sup>

Tidak ada perbedaan yang mendasar antar hak sesama manusia. Perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan merupakan rahmat dari Allah, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antara umat dan bangsa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”<sup>14</sup>*

Lebih lanjut tentang kemampuan seseorang untuk menerima suatu urusan (hukum) dalam kajian *ushul fiqh* disebut dengan *Ahliyah*. Adapun ketika *ahliyah* nya itu terganggu atau rusak (*Awaridh Ahliyah*) akan ada hukumannya bagi seseorang yang sudah bisa dibebankan hukum. Dan hukuman atau sanksi yang

---

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Op. Cit*, h. 51.

<sup>14</sup> Departement Agama RI, *Op.Cit*, h. 517.

diberikan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun itu sampai kepada hukuman tambahan yaitu penghilangan hak politik seseorang. Tapi dalam ajarannya, Islam sangat menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang salah satunya hak politik.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan. Kemudian pandangan Hukum Islam dan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung tentang hak politik mantan koruptor untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam kontestasi Pemilu.

#### **E. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018 tentang Hak Politik Mantan Koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018 tentang Hak Politik Mantan Koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung tentang Hak Politik Mantan Koruptor.
2. Untuk mengkaji pandangan Hukum Islam dan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018 tentang Hak Politik Mantan Koruptor.

#### **G. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai hak bekas koruptor dalam pandangan hukum Islam dan Konstitusi Indonesia studi tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018.

2. Secara Praktis (bagi masyarakat)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat karena terjadi nya kesimpang siuran informasi terkait putusan Mahkamah Agung ini, dan juga terutama setiap orang yg ingin memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara di Perguruan Tinggi Fakultas Hukum. maupun Fakultas Syariah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah Hak Politik dan menetapkan hukum dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.
- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah amandemen nash

---

<sup>15</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi* (Bandung : Taruna Grafika 2000) h. 38



Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ilmu *Fiqh Siyasah* Undang-undang Dasar 1945, putusan Mahkamah Agung nomor 46p/hum/2018.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, media masa, dan sebagainya.<sup>16</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data mengenai putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), h. 52.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber al-Quran dan as-Sunnah.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa melalui Putusan Mahkamah Agung maupun sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan hukum Islam dan Konstitusi.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 77.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Hak Politik Macamnya

Kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat.<sup>18</sup>

Sedangkan kata politik, dalam bahasa Arab disebut *Siyasah* berasal dari perkataan bahasa Yunani Purba yaitu "*polis*". Polis adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani Purba, yang pada saat itu kota dianggap identik dengan negara. Dengan demikian, "*polis*" "Kata ini terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos* yang berarti *relating to citizen*."<sup>19</sup> Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna "*city*" yang berarti kota, *politic* kemudian diserap kedalam Bahasa Indonesia dengan arti, yaitu: segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya). Mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kecurangan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai ilmu

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit* , h. 474.

<sup>19</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 23.

<sup>20</sup> Abd Muin Salim, *Fiqh Siyasah*, : *Konsepsi Kekuatan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1995, Cet II) h. 34.

pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.<sup>21</sup>

Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.<sup>22</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya sebagai suatu sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.<sup>23</sup>

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide,

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), h. 292.

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit* , h. 14.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 13.

azas-azas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.<sup>24</sup>

Politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Mengacu pada pengertian tersebut politik yang berasal dari kata *polis* yang berarti negara bisa yang baik, karenanya setiap negara harus memiliki suatu aturan main yang disebut undang-undang juga diartikan sebagai bentuk kumpulan yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan suatu atau hukum, pemegang otoritas hukum yang kemudian disebut sebagai *politicos* atau raja, dan yang melaksanakan aturan pemerintahan dalam hal ini semua lapisan masyarakat yang mengakui kekuasaan seorang pemimpin.

Dari penjelasan diatas, secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.<sup>25</sup> Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h.17.

<sup>25</sup> A.M.Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* (Jakarta, gema insani press, 1996) cet 1, h.17.



berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Hak politik digunakan dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilih maupun yang dipilih. Setidaknya ada empat fungsi Pemilu yang terpenting: legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah/penguasa dikukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karena pemaksaan dari atas. Selanjutnya melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan rakyat dilakukan secara lebih *fair* karena keterlibatan warga negara.

Macam-macam hak politik warga negara Indonesia dibidang politik ,yaitu:

1. Hak untuk dipilih menjadi anggota eksekutif dan legislatif
2. Hak untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif
3. Hak untuk mempunyai kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
4. Hak untuk mendirikan partai politik

5. Hak untuk membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
6. Hak untuk menyampaikan pendapat yang berupa usulan petisi

Adapun pada tahun 1986 silam, muncul konsep hak asasi manusia yang baru, yaitu mengenai hak untuk pembangunan atau *right to development*. Hak/atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut.<sup>26</sup> Yang termasuk hak-hak asasi manusia antara lain:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat
9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
10. Hak untuk memilih dan dipilih

Dalam Islam, Politik atau *siyâsah* mempunyai makna mengatur urusan umat, baik secara dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik

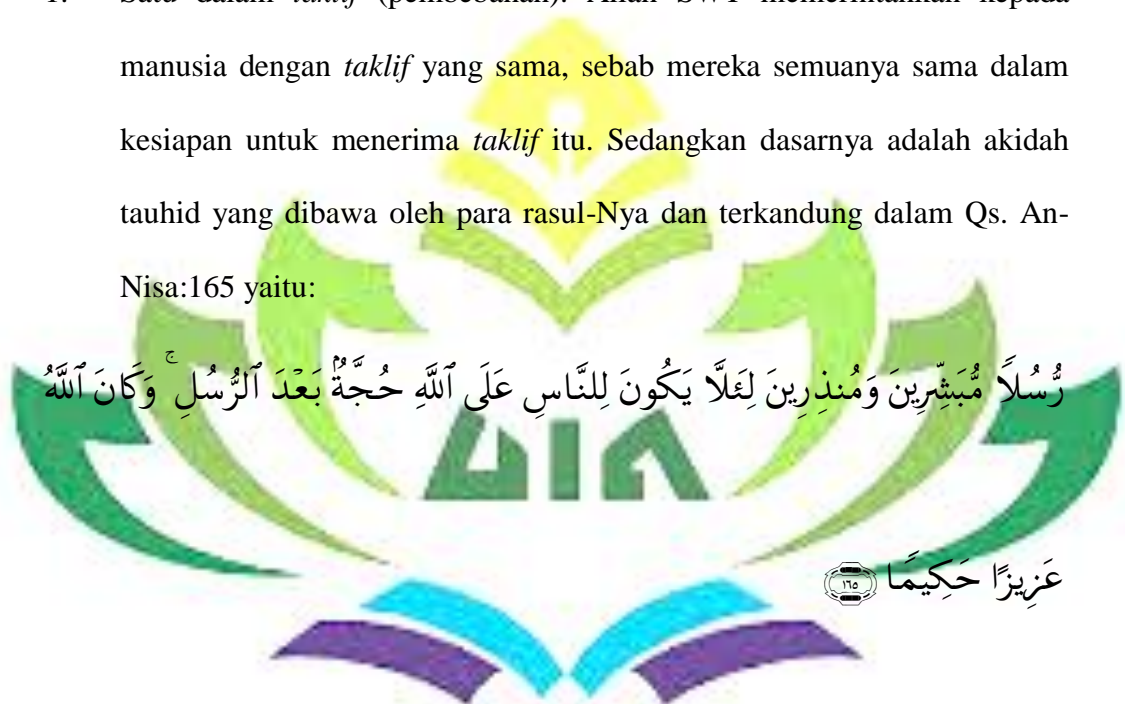
---

<sup>26</sup> Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good governance Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga: 2010), h. 26.

oleh negara (pemerintah) maupun umat (rakyat), negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat atau rakyat mengoreksi (muhasabah) pemerintah dalam melakukan tugasnya.

Persamaan hak antara manusia seluruhnya tampak pada dalil nash al-quran berikut:

1. Satu dalam *taklif* (pembebanan). Allah SWT memerintahkan kepada manusia dengan *taklif* yang sama, sebab mereka semuanya sama dalam kesiapan untuk menerima *taklif* itu. Sedangkan dasarnya adalah akidah tauhid yang dibawa oleh para rasul-Nya dan terkandung dalam Qs. An-Nisa:165 yaitu:



*“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>27</sup>

2. Satu dalam asal. Manusia sama pada asal kejadian yang terkandung dalam Qs.An-Nisa:1 yaitu

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI , *Op. Cit*, h. 104.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٣﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>28</sup>*

Persamaan antara manusia dalam dua dasar ini menuntut tidak menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antara umat dan bangsa. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Hujurat:13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-*

---

<sup>28</sup>Ibid, h. 77.

*bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*”<sup>29</sup>

Allah menjadikan takwa kepada-Nya sebagai tolak ukur keutamaan atau kemuliaan di sisi-Nya. Di antara sikap takwa kepada-Nya adalah berbuat baik dan berlaku adil di antara manusia. Oleh karena itu, tidak bertindak mereka untuk membantu orang yang terzalimi dan menolak pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, manusia mana saja merupakan dukungan untuk orang yang berbuat zalim dan peneguhan bagi kezaliman. Apa saja yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia baik secara internasional atau regional dianggap sebagai perwujudan makna saling mengenal dan mewujudkan tujuannya.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa pendapat dari ahli politik tentang hak-hak politik. Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:<sup>31</sup>

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara.
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 417.

<sup>30</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*. (Jakarta:Amzah, 2005)h. 223.

<sup>31</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Op.Cit*, h.65



5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu.

Dengan rincian yang agak sedikit berbeda, Abd- al-Karim Zaidan juga mengemukakan enam macam hak politik yang bisa dinikmati oleh rakyat/warga negara sebuah komunitas Islam. Keenam hak politik yang dimaksud itu adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun melalui perwakilan,
2. hak musyawarah/hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, utamanya kepala negara, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/rakyat,
3. hak pengawasan/hak untuk mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara,
4. hak memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila tidak dapat menjalankan dengan baik tugas yang di amanatkan umat/rakyat kepadanya,
5. hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara/presiden, dan
6. hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

Mengenai hak politik yang terakhir, yakni hak untuk menduduki jabatan-

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.54.

jabatan umum tertentu dalam pemerintahan Abd al-karim Zaidan berkomentar, siapa saja yang memiliki keahlian punya hak untuk duduk dalam jabatan-jabatan umum pemerintahan. Siapapun yang cocok, mesti ditunjuk tanpa memandang ada atau tidaknya hubungan kekerabatan dan atau yang lainnya. Bila dalam proses pengangkatan tersebut terdapat unsur-unsur kolusi dan nepotisme, pelakunya dipandang telah melakukan pengkhianatan dan menghancurkan amanat yang dipercayakan kepadanya, yang antara lain menuntutnya melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tidak tepat

Argumentasi yang dimajukan Zaidan sehubungan dengan hal tersebut adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini,

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*“Jika amanat disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Ada yang bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Beliau bersabda, “Jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Al Bukhari)*

## **2. Kemampuan, Syarat dan Faktor Penghapusan Hak Politik dalam Hukum Islam**

### **a. Pengertian Kemampuan Keahlian (*Ahliyah*)**

Dari segi etimologi *ahliyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”, Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>33</sup>

Secara istilah, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyah* dengan :

صِفَةُ يُقَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لِخِطَابِ تَشْرِيعِيٍّ

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan oleh syar’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara.”<sup>34</sup>

Maksudnya, *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akhlaknya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Melalui definisi di atas ini dipahami bahwa *ahliyah* merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalanya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.

#### **b. Macam-macam Kemampuan (*Ahliyah*)**

Ulama ushul membagi keahlian ini kepada dua bagian.

- 1) *Ahliyah al-Wujub*, yakni kelayakan seseorang untuk ada padanya hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah pada manusia. Sebab khusus itu oleh para *fuqaha*

---

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 191.

<sup>34</sup> Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Bekasi: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 2.

disebut *al-zimmah*, yaitu sifat firiyah insaniyah yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak, mumayyiz atau baligh, pintar atau bodoh, waras atau gila, dan sakit atau sehat.<sup>35</sup> Pokoknya, selama ia disebut manusia, selama itu pulalah keahlian itu ada padanya. Dengan kata lain, keahlian wujud adalah kemanusiaanya itu sendiri. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujûb*, karena *ahliyyah al-wujûb* adalah sifat ke"manusia"annya. Para ahli *ushul fikih* membagi *ahliyyah al-wujûb* kepada dua bagian, yaitu:

a) *Ahliyyah al-wujûb al-nâqishah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.<sup>36</sup> Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya.

Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum

---

<sup>35</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 151.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, h. 192

bernama manusia.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain

*b) Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.<sup>37</sup> Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

Contoh *ahliyyah al-wujûb al-kâmilah* adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 193.



(*sakarāt al-maut*). Disamping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

- 2) *Ahliyyah al-Adâ'*, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Artinya, apabila itu seseorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum.<sup>38</sup> Misalnya, bila ia mengadakan transaksi bisnis, tindakannya itu dipandang sah dan ada konsekuensi hukumnya. Bila ia melakukan shalat, puasa atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, perbuatannya dianggap sah oleh syara' bila cukup rukun dan syaratnya dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitu juga bila ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, ia akan dikenai sanksi hukum pidana, baik pidana badan maupun harta. Pokoknya, *ahliyat al-ada'* adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-adâ'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah:

- a) *Adim Al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

---

<sup>38</sup> Alaidin Koto, *Op. Cit* h. 152.

Adapun yang dimaksud dengan *adim al-ahliyyah* yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum.<sup>39</sup> Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini seorang anak belum sempurna akal nya atau belum berakal, sedangkan *taklif* dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak semumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Selain anak kecil, keadaan ini juga dimiliki oleh orang yang gila sebab akal nya juga tidak sempurna. Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal.

b) *Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Nâqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

*Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Nâqishah* adalah seseorang yang sudah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *nâqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akal nya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.

Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 193.

seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.<sup>40</sup>

c) *Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Kâmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah al-adâ'' al-kâmilah* yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.<sup>41</sup>

Para ulama *ushul fikh* menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-adâ''* adalah „aqil, baligh dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa : 6

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 194.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 194.

*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*<sup>42</sup>

Menurut para ulama *ushul fikih*, kalimat “cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan sebaik-baiknya dan dapat dapat ia laksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak ia laksanakan dan larangan tetap ia langgar, maka ia bertanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-adâ*” di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujûb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-adâ*”). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akal nya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akal nya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

---

<sup>42</sup> Departmen Agama RI , *Op.Cit*, h. 77.

### c) **Sebab-sebab Hilangnya Keahlian (*Awarid Ahliyah*)**

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*ahl li al-wujub*), dan sejak dewasa dari segi usia dan akalnya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada*), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah '*awarid al-ahliyah* (penegasi-penegasi kecakapan) atau *mawani at-taklif* (penghalang-penghalang *taklif*).

Faktor-faktor penghalang *taklif* itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-awaridh as-samawiyyah* dan *al-awaridh al-muktasabah*.

#### a) *Al-awaridh as-samawiyyah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-awaridh as-samawiyyah* ialah, halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

##### (1) Gila (*al-junun*)

Keadaan gila ialah, hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu tindakan logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan bertindak

---

<sup>43</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 101.



wajar. Keadaan gila pada diri seseorang dapat dibedakan dari segi waktu, yaitu sebagai berikut.

(a) Gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan berkelanjutan (*al-junun al-muabbad*). Keadaan gila ini menghilangkan kewajiban dalam ibadah yang bersifat fisik, seperti sholat dan puasa.

(b) Gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan (*al-junin al-muaqqaf*). Keadaan gila ini tidak menghalangi beban *taklif*.

(2) Lemah Akal (*al-'atah*)

Yaitu Kelemahan dalam akal sehingga meracau omongannya, kadang seperti omongan orang yang sehat, kadang seperti omongan orang yang gila dan begitu pula urusan-urusan yang lain. Hukum orang yang ma'tuh (kurang akal) sama dengan anak kecil dalam masa tamyiz dalam seluruh urusannya.

(3) Kelupaan (*An-Nis-yan*)

Yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulnya. Adapun hak-hak yang menyangkut lupa ini berbagi menjadi dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia atau hamba. Hukum lupa berkaitan dengan kedua hak itu tidaklah sama. Dalam menyangkut hak manusia, hak tidak gugur karena lupa. Dengan kata lain, lupa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindarkan diri dari suatu hak.

(4) Tidur

Yaitu halangan *taklif* bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan keadaan orang jahil yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tertidur termasuk salah satu sebab diantara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak Allah.<sup>44</sup>

#### (5) Pingsan

Yaitu halangan yang mencegah pemahaman khitob lebih banyak daripada pencegahan tidur terhadapnya, maka berlakulah padanya apa yang berlaku dalam keadaan tidur karena ia lebih banyak daripadanya, menjadikan membatalkan wudhu dalam keadaan bahkan dalam sholat.

#### (6) Penyakit

Penyakit tidak bertentangan dengan *ahliyah* hukum dan ibadah, karena tidak ada kekurangan dalam tanggungjawab, akal dan ucapan. Karna itu mengandung kelemahan disyariatkanlah ibadah menurut kadar kemampuannya.

#### (7) Haid dan Nifas

Haid dan Nifas ini tidak menggugurkan ahliyah kewajiban maupun penunaian. Tetapi ditetapkan bahwa bersuci merupakan syarat dari sahnya sholat dan puasa, maka tidak mungkin menunaikan keduanya. Tidak berlaku qodlo sembahyang, karena mengandung kesempitan berlainan dengan puasa dan karna adanya larangan menunaikan puasa dalam

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 370.

keadaan haid dan nifas. Karena mustahil bahwa satu hal dari satu segi dilarang dan diwajibkan penunaianya, sedangkan qodlo diwajibkan karena adanya sebab yaitu penyaksian bulan.

#### (8) Kematian

Kematian menggugurkan hukum-hukum dunia taklif seperti zakat, puasa dan haji dan lain-lainya, dan tinggallah dosa kewajiban yang disia-siakannya.<sup>45</sup> Bila sebelum mati ada kewajiban berupa hak orang lain yang bersangkutan dengannya dalam bentuk meteri maka hak itu tetap berlaku selama materi itu masih ada. Seperti amanat, titipan, barang rampasan, dan barang yang dibeli belum dibayar. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah kembalinya hak tersebut kepada pemiliknya. Ini harus berlaku meskipun yang berkewajiban sudah mati. Adapun bila orang yang mati mempunyai hutang dan meninggalkan harta maka wajib dibayar, dan orang yang mati mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta maka gugurlah tuntutan terhadap orang mati itu. Dalam hal ini menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan Imam Mujaahid berpendapat bahwa jaminan yang diberikan sesudah kematian adalah sah, karena orang mati bebas dari kewajiban membayar hutang. Karnanya ia dituntut menyelesaikan hutangnya bila ada hartanya. Bila ada penjamin untuk membayar hutang maka pihak berpiutang boleh mengambil.

#### b) *Al-awaridh al-muktasabah*

---

<sup>45</sup> Abd Rahman Dahlan, *Op. Cit*, h. 105.

Adapun yang dimaksud dengan *al-mawaridh al-muktasabah* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

(1) Mabuk.

Yaitu tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang memengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat.<sup>46</sup>

(2) *Safih* (bodoh)

Yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendakai oleh akal yang sehat. *Safih* tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum syara'. Terhadapnya berlaku tuntutan syara', baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia mukallaf secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak safih dengan tidak kurang sedikitpun. Safih dapat perlindungan syara' atas hartanya dari kerusakan hanya karena kelemahan pada dirinya.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit*, 371

Apabila sifat safih mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat. Dasarnya adalah Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 5 yang artinya<sup>47</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*“Jangan kamu berikan harta kepada orang safih yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharanya”.*

Kemudian Allah dalam surat berikutnya menggantungkan penyerahan harta kepadanya dengan sifat cerdas, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa ayat 6 yang artinya : *“Ujilah anak yatim (anak-anak) itu sampai ia mencapai umur dewasa; jika kamu telah mengetahui ia cerdas berikanlah harta (nya) kepadanya.”*

Jahil terbagi menjadi dua bentuk, Yaitu :

- (a) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalunya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya; seperti shalat lima waktu, puasa Rhamadhan, ibadah haji dan zakat.

---

<sup>47</sup> Departmen Agama RI , *Op.Cit*, h. 77.



(b) Pengetahuan secara khusus yaitu menyangkut furu' ibadat atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama.<sup>48</sup>

#### (4) Perjalanan (*safar*)

Perjalanan tidaklah menyalahi *ahliyah* hukum, akan tetapi *As-Syar'i* menjadikannya sebab keringanan. Maka disyariatkan shalat dua rokaat dan diijinkan dalam perjalanan meninggalkan puasa. Walaupun perjalanan baru dimulai ia boleh berbuka atau berpuasa, tapi jika berbuka ia tidak perlu membayar khafarah karena kemungkinan timbulnya *syubhat*. Ditetapkannya qashar atas empat rokaat dengan sekedar memulai perjalanan bukan diharuskan sesudah menempuh perjalanan, karena perjalanan dianggap terwujud setelah berjalan selama tiga hari tiga malam atau jarak yang sama dengan itu.<sup>49</sup>

#### (5) Tersalah (*khatha'*)

Yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Umpamanya seseorang berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa, dan tanpa sengaja air masuk kedalam perutnya.

#### (6) Terpaksa/ Paksaan (*Ikroh*)

Ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya.<sup>50</sup> Atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak desengingnya baik perkataan maupun perbuatan

---

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit*, 375.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 384.

<sup>50</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit*, h. 110

sehingga andaikata ia dibiarkan niscaya tidaklah dilakukannya. Dalam hukum terdapat dua kata yaitu ikhtiar dan ridho, yang dimaksud dengan ikhtiar yaitu mengutamakan pelaksanaan suatu perbuatan dari pada meninggalkannya dan ridho yaitu kesenangan melakukan sesuatu.

### **3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi**

#### **a) Pengertian Konstitusi**

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (bahasa Inggris) – *constituate* (Bhs. Belanda), *constituer* (Bhs. Prancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan dan disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara.

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “Constitution”, yang dalam bahasa Indonesia jika kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar. Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman *Anglo-Saxon* dengan Undang-Undang Dasar.<sup>51</sup>

Berdasarkan suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut

---

<sup>51</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Yogyakarta, 2000), h. 17.

dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menemukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>52</sup>

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.

Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan pada konstitusinya.

#### **b) Konstitusi di Indonesia**

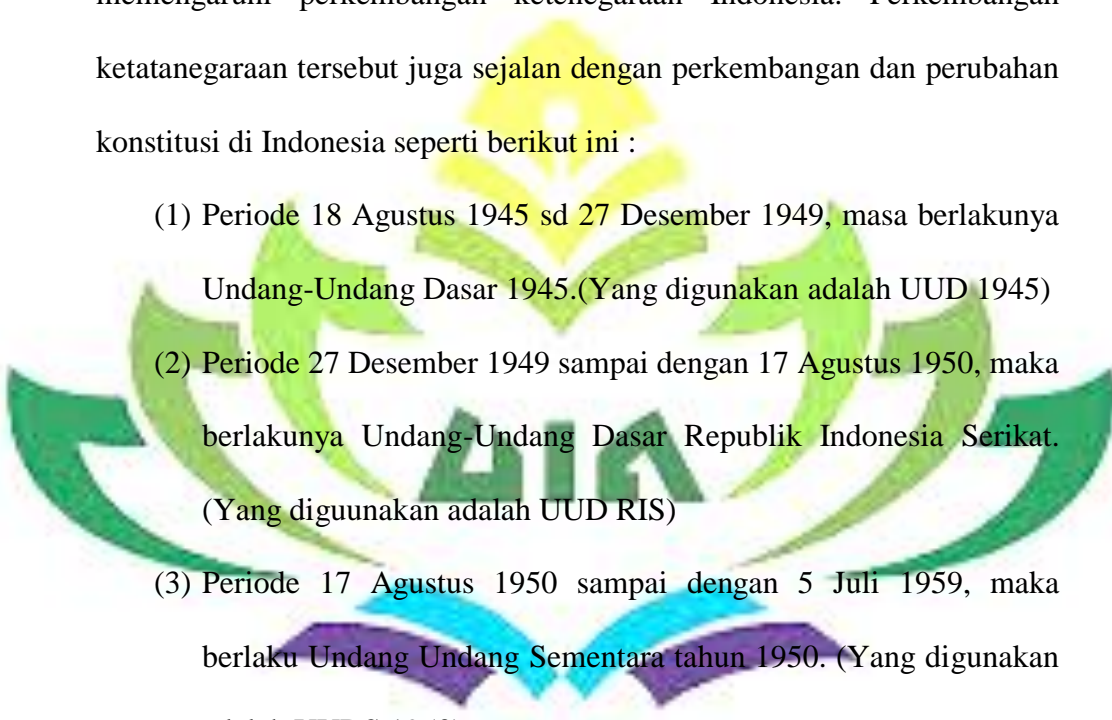
Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan materiil. Konstitusi dalam arti formil dan materiil. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi

---

<sup>52</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika : 2011), h. 18.

tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945.

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tertentu akan memengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti berikut ini :

- 
- (1) Periode 18 Agustus 1945 sd 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. (Yang digunakan adalah UUD 1945)
  - (2) Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, maka berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. (Yang digunakan adalah UUD RIS)
  - (3) Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, maka berlaku Undang Undang Sementara tahun 1950. (Yang digunakan adalah UUDS 1950)
  - (4) Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. (Yang digunakan adalah UUD 1945).
  - (5) Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
  - (6) Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.

Jika dilihat diatas, perubahan konstitusi sangat dimungkinkan jika dalam kondisi pemerintahan yang kacau dan konstitusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yaitu termuat dalam perubahan UUD 1945, yaitu dalam pasal 37 UUD 1945. Adapun yang tidak bisa diubah seperti termaktup dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 ialah : “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

#### **c) Pengertian, macam Hak dan Kewajiban**

Suatu negara tentu memiliki hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Begitupula dengan warga negara, memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak ia masih berada didalam kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. dearajat atau martabat.<sup>53</sup>

Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. suatu kewajiban dapat dikatakan

---

<sup>53</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h, 474.



sebagai hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seorang miliki.<sup>54</sup>

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.<sup>55</sup>

Hak warga negara Indonesia :

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”(pasal 27 ayat 2).
- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (pasal 28A).
- 3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- 5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 1266.

<sup>55</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 83.

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1) Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2) Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4) Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

#### **d) Penyebab Hilangnya Hak-hak Warganegara**

Undang-undang Dasar Negara Indonesia sebagai *constitutional right*, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan perjanjian atas hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
- b. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (*Akuntabilitas Publik*) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.<sup>56</sup>

Sri Soemantri menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:<sup>57</sup>

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau

---

<sup>56</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamadi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 2.

<sup>57</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 52.

- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan kaatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya.<sup>58</sup>

TAP MPR-RI No.XVII MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang temaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen intemasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 87.



pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>59</sup>

Manusia dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Hak memberi suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak untuk memilih dan dipilih (*basicright*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>60</sup>

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih, cara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 280 ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan pada Pasal. pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajibanpun harus bersama-sama. Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>59</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : PT Rajawali Pers , 2008) h. 45.

<sup>60</sup> Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajaawali Pers, 2011) h. 160.

Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.<sup>61</sup> Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia sipil dan politik yang

---

<sup>61</sup> Tim Pengajar HTN FH Unila, *Hukum Tata Negara* (Bandarlampung: Justice Publisher, 2014) h. 144.

tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait, Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal.

*International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR), Maka yang terhimpun didalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negatif rights*). Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin didalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) karena itu sering disebut hak-hak positif (*positive right*).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001) h. 49.

Negara-negara pihak dalam *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR) diperbolehkan memperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan umum atau moralitas umum; dan menghormati hak atau kebebasan orang lain. Rosalyn Higgin menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan “*clawback*”, yang memberikan suatu keleluasaan kepada negara yang dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal ini *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR) menggariskan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dibatasi melebihi dari yang ditetapkan oleh kovenan ini. Selain diharuskan menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara-Negara Pihak *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR).

Gugurnya hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, seseorang yang terkena pidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik.

Dasar hukum yang menyebabkan hilangnya hak politik terdapat pada pasal 10 KUHP. Dan juga pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Banyak ahli hukum berpandangan bahwa hilangnya hak asasi seseorang

bukan termasuk pelanggaran karena masuk dalam *derogable right*, hak yang bisa dilanggar dalam rangka penegakkan hukum.

Kemudian, hak-hak yang bisa dicabut sesuai pasal 35 Ayat (1) (KUHP, adalah; (i) Hak memegang jabatan tertentu; (ii) Hak memasuki angkatan bersenjata; (iii) Hak memilih dan dipilih; (iv) Hak menjadi penasihat, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; (v) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwaakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan (vi) Hak menjalankan pekerjaan tertentu. Pada masa lalu, hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (*mort civile*) bagi pelaku kejahatan berat, namun sekarang umumnya tidak diberlakukan. Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Dari segi teori sering dikatakan, bahwa pemilu merupakan wujud langsung dari peran serta politik masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang diembannya, ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya tidak membatasi keterlibatan pemilih di dalam praktek pemilu. Dalam pemilu misalnya, ditentukan bahwa setiap warga negara yang sudah cukup dewasa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih maupun dipilih. Pemilu tidak membedakan latar belakang sosial budaya, politik dan ekonomi dari para pemilih. Sejauh mereka sudah memenuhi persyaratan formal, tidak seorangpun berhak untuk mencabut haknya.

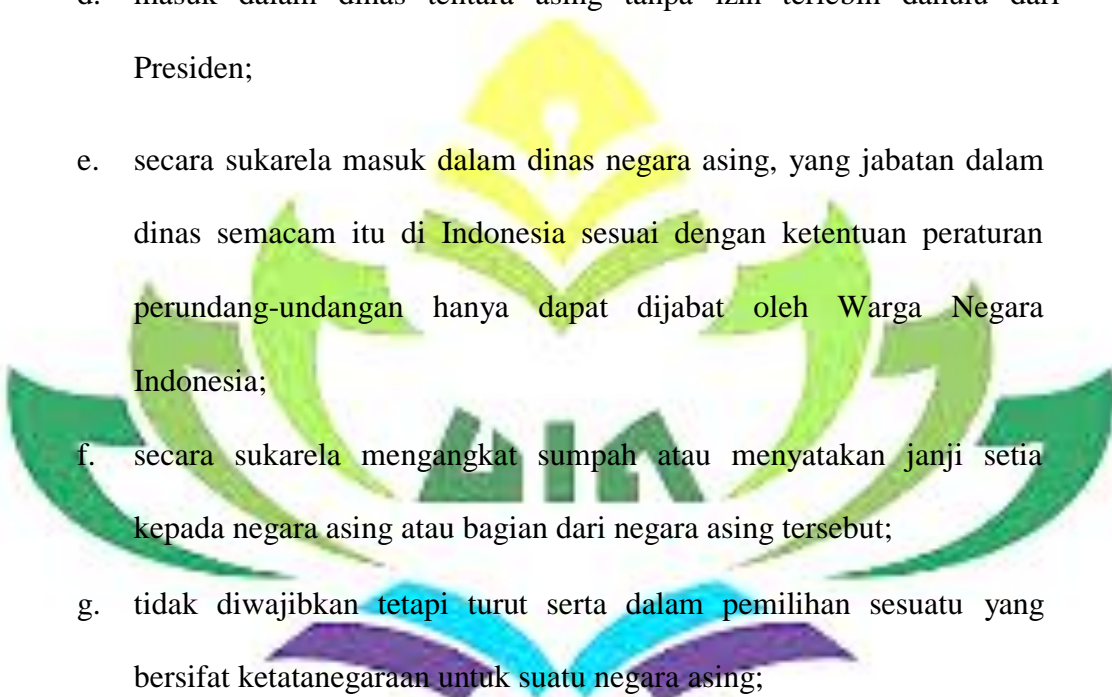


Hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Karena itu dalam mendukung persamaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat melampaui batas-batas tertentu. Hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Artinya, hak-hak ini kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga asing.

Prinsip hak asasi manusia universal menyebutkan negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be elected*). Karenanya setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apapun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini supaya tercapailah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih luas, Indonesia sudah mengeluarkan produk hukum yang berisi tentang penyebab hilangnya hak-hak warga Negara. Dalam pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006, dinyatakan kewarganegaraan Republik Indonesia hilang, jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;

- 
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
  - d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
  - e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  - f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  - g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  - h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak

mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia Kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- 
- i. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
  - j. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- Atau jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang

kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang , dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fortuna DM yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota Legislatif. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Adapun tiga jenis pengumpulan data yaitu dari dokumentasi, observasi, interview, dan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif, dan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (ii) berlaku

terbatas jangka waktu hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai sebagai pelaku kejahatan yang berulang-berulang.

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Gita Kumala Sari yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.04/PUU-VII/2009 Tentang Pencabutan Hak Politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dan dampak yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-VII/2009 Tentang Pencabutan Hak Politik untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.04/PUU-VII/2009 adalah Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang tersebar di berbagai undang-undang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 dengan amar putusan permohonan ditolak, maka menurut pemerintah, permohonan dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang tidak memiliki alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dan dampak yuridis terhadap hak-hak konstitusional narapidana sebagai warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan hak



memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dari kedua penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi yang saya kerjakan. *Pertama*, Judul yang saya angkat berbeda karena di kedua skripsi di atas keduanya menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan saya menganalisis putusan Mahkamah Agung. *Kedua*, teori yang digunakan pada kedua skripsi diatas yaitu kebanyakan teori fiqh siyasah. Di skripsi yang saya buat, menambahkan teori *ushul fiqh* tentang *ahliyah*. *Ketiga*, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif komparatif.



**BAB III**  
**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, LATAR BELAKANG, ISI DAN**  
**ARGUMENTASI**

**D. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018**

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan bertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan nomor 46P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Agung pada pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 *juncto* Pasal 31 Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang.

**1. Pemohon dan Kepentingan Hukum**

Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat

Singkatnya menurut pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31A ayat (2) UU MA, beranggapan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat pencalonan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan perintah konstitusi. Norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada pemohon karena Pemohon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara korupsi, padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Umum, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau

kewenangan konstitusi dirugikan dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, sama sekali tidak ada Pidana Tambahan yang melarang Pemohon untuk dipilih dan/atau memilih atau untuk aktif dalam kegiatan politik atau dalam suatu jabatan politik dan/atau menduduki jabatan di pemerintahan, atau dengan kata lain melarang Pemohon untuk menjadi calon wakil rakyat di DPR atau DPRD.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”* Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi, “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3” dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

Berlakunya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan perseorangan calon Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tersebut telah serta merta menghukum dan membatasi hak

seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri pemohon.

Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010. Dalam putusan tersebut pemohon dijatuhi pidana kurungan penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan yang melarang Pemohon untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih, atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Namun demikian dengan adanya aturan yang terdapat dalam PKPU yang diuji tersebut menjadi mustahil bagi pemohon untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Pemohon yang telah menjalani hukuman pidana sesuai dengan aturan, kemudian kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk beraktifitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Melakukan kegiatan seperti sediakala seperti sebelum menjalani hukuman pidana penjara.



Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam hal ini menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian hak nya terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam pasal 4 ayat (3) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Momor 20 Tahun 2018 telah membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Tentang Pokok Perkara**

Fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi anggota calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yakni pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1), dan Lampiran Model B.3.

- a. Pasal 4 ayat (3) PKPU nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, *“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”*
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi, *”Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”*
- c. dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

Beberapa pasal dalam PKPU tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara**

Adapun sebelum mahkamah melakukan pertimbangan terhadap permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan, hal ini dikarenakan undang-undang yang menjadi dasar dari permohonan sedang menjalani proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini didasarkan kepada pasal 55 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya menyatakan "pengujian peraturan perundangundangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan di Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila

apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi".

Hingga turun surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, yang ternyata dasar pengujian yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang dimaksud tidak ada pasal atau norma yang berkaitan dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, untuk itu penetapan penundaan pemeriksaan permohonan sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan.

Pokok permohonan terkait larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu berdasarkan pengakuan pemohon yang mengakui bahwa dirinya merupakan mantan terpidana korupsi dan telah mendapatkan hukuman serta tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak sehingga dalam hal ini yang menjadi persoalan terdapat pada frasa "korupsi".

Hakim menilai Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73

undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terhadap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A sebagaimana telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights*.

Untuk itu sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dalam undang-undang atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang yang disebut didalam hukuman tambahan.

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung norma yang diatur dalam ketentuan yang disebutkan diatas bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

Meskipun maksud dari KPU rumusan norma tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap bakal calon anggota legislatif, agar tidak mengikut sertakan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, menurut Mahkamah tetap saja hal tersebut pada intinya membatasi hak politik

seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Selanjutnya pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan pula dengan pasal 12 huruf d dan tidak sejalan dan berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Adapun rumusan pasal 12 huruf d undang-undang nomor 12 tahun 2011 menentukan "peraturan dibawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" sehingga menurut Mahkamah Agung KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Mahkamah Agung berpendapat penyelegaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas, namun kembali ditegaskan bahwa pembatasan terhadap hak politik seorang warga negara dimuat dalam undang-undang bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang *in casu* Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.



#### **E. Pendapat Hakim Mahkamah Agung dan Pokok Permohonan**

Bahwa objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018);

Bahwa Pemohon adalah mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa ***mantan terpidana korupsi*** tersebut;

Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;

Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih);

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”

Bahwa “Pasal 11 ayat (1) huruf d, menentukan “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ...  
d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3”;

Bahwa Lampiran Model B.3 berisi tentang Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

- a. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan

Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan, “peraturan di bawah undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Komisi Pemilihan Umum telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

#### **F. Amar Putusan**

Amar Putusan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Tentang Pencalonan Mantan Koruptor Sebagai Calon Legislatif mengadili dan menyatakan;

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon



**JUMMANTO** tersebut;

2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



## **BAB IV**

### **A. Analisis dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 46P/Hum 2018**

Pasca putusan Mahkamah Agung No. 46p/Hum/2018, hal tersebut disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Jumanto calon anggota legislatif untuk DPRD Probolinggo, Jawa Timur yang gagal karena terganjal kasus pidana. Dia menyatakan bahwa adanya ketentuan Pasal pasal 4 ayat (3) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat pencalonan legislatif telah berlaku tidak adil padanya. Padahal secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 serta UU Pemilu No. 7 tahun 2017.

Keputusan Mahkamah Agung tentang diperbolehkannya mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (DPR, DPD, DPRD) ternyata mengundang kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai argumen tentang putusan Mahkamah Agung tersebut muncul di berbagai media masa baik elektronik maupun media cetak.

Banyak masyarakat yang berargumentasi bahwa untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan, apa jadinya jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat hal-hal yang merugikan rakyat.

Ditambah lagi dengan survey berdasarkan data dari lingkaran survey

Indonesia (LSI) pada tanggal 18 juni-5 juli 2018 jumlah respon mencapai 1200 orang Indonesia dan hanya 65 persen respon yang percaya terhadap DPR sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5 persen tidak menjawab. Dan penyebab terjadi hal ketidakpercayaan masyarakat kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya adalah sering terjadi praktik korupsi di parlemen.<sup>63</sup> Menurut penulis argumentasi tersebut hanya melihat dari segi negatifnya saja tanpa melihat dari segi positifnya dari seorang mantan narapidana.

Menurut penulis tentang dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No.46p/Hum/2018 sudah tepat. Keputusan yang akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang didasarkan pada konstitusi yang ada di negara kita UUD 1945 yakni pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tentang hak politik warga negara dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa norma hukum:

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan

---

<sup>63</sup> “Survey LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan terendah”, (Online) <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah?page=all> (20 Juni 2011).

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tahun 2017 Undang-undang pemilu telah mengalami pembaharuan, Undang-Undang yang mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota legislatif baik DPD, DPR, dan DPRD, persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi anggota legislatif yakni dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Undang-undang inipun telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Atas beberapa dasar pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan, keterangan pemerintah dan pihak pemohon. Akhirnya Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon.



Menurut penulis tentang kasus diatas apabila seseorang telah menjalani penjara atau pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang gagal. Artinya proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan/tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana.

#### **B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 Tentang Hak Politik Mantan Koruptor dalam Hukum Islam dan Konstitusi**

Berdasarkan penelitian para ahli Ushul Fiqh bahwa Allah telah menurunkan syari'at Islam dengan beberapa tujuan (*Muqasid al Tasyri* atau *Muqasid al Syari'ah*). Yang secara garis besar terdiri dari tiga hal, yakni *dharuriyat* (tujuan pokok), yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila mana hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan hidup manusia; *hajiyaat* (tujuan sekunder), yaitu hal-hal dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan dalam hidup di dunia. Bila mana hal tersebut tidak dipenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan; dan *tahziniyat* (tujuan tersier), yaitu hal-hal perlengkapan yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak baik.

Tujuan pokok atau *dharuriyat* meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta (*al muhafadlah, ala al-din, wa al-mafz, wa al-'aql, wa al*

*nasl, wa al mal*), kedudukan manusia di muka bumi ini di topang oleh lima hal ini.<sup>64</sup> Manusia tidak akan meraih kehidupan yang mulia tanpa memelihara hal tersebut, karena kemuliaan manusia itu terketak pada terjaganya lima perkara tersebut.

Dalam ilmu *Ushul Fiqh*, kemampuan seseorang untuk menerima suatu hukum disebut juga dengan *ahliyah*. *Ahliyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”, Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu.

Secara istilah, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyah* dengan :

صِفَةُ يُقَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لِحِطَابٍ تَشْرِيعِيٍّ

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan oleh syar’i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara.”

Maksudnya, *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akhlaknya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Melalui definisi di atas ini dipahai bahwa *ahliyah* merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalunya sehingga semua

---

<sup>64</sup>Y Yubsir, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al Adalah, Vol 11, 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 242. (on-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265> (22 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

perbuatannya dapat dikenai taklif.

Ulama *ushul* membagi keahlian ini kepada dua bagian.

- a. *Ahliyah al-Wujub*, yakni kelayakan seseorang untuk ada padanya hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah pada manusia.
- b. *Ahliyah al Ada'*, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Artinya, apabila itu seseorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum.

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-adâ*'' terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah:

- a) *Adim Al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan) yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini seorang anak belum sempurna akalinya atau belum berakal, sedangkan *taklif* dikaitkan kepada sifat berakal.
- b) *Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Nâqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)  
*Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Nâqishah* adalah seseorang yang sudah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *nâqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalinya masih lemah dan belum sempurna.
- c) *Ahliyyah Al-Adâ'' Al-Kâmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah al-adâ'' al-kâmilah* yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-adâ* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujûb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-adâ*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

Dalam hal seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan, orang tersebut telah dikenakan taklif. Bahkan termasuk golongan *ahliyyah al ada* karena telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, dan dapat disebut sebagai mukallaf.

Mantan terpidana koruptor yang pernah melakukan pidana atau kesalahan, dalam kajian *ushul fiqh* hal tersebut dapat menyebabkan rusak bahkan hilangnya keahlian (*awarid ahliyah*) .

Meskipun sejak lahirnya, seorang mantan koruptor tadi telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*ahl li al-wujub*), dan sejak dewasa dari segi usia dan akalnya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada*).

Faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya.

Adapun dalam putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 tentang mantan koruptor yang diperbolehkan mencalonkan diri sebagai legislatif. Dalam kajian ilmu *ushul fiqh* seorang tadi terkena penghalang kecakapan dalam berbuat hukum yang berasal dari luar dirinya (*'Awaridh Muktasabah*) yaitu *safah* (bodoh) dan jahil (ketidaktahuan tentang adanya hukum).

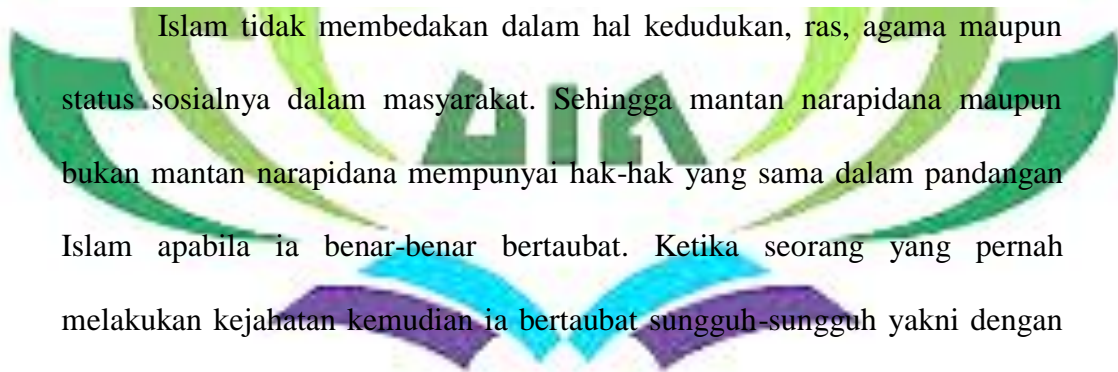
*Safah* yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat sesuatu menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. Perbuatan *safah* (bodoh) tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum *syara'*. Terhadapnya berlaku tuntutan *syara'*, baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia *mukallaf* secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak safih dengan tidak kurang sedikitpun.

Dalam hal mantan koruptor yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menurut penulis mereka termasuk golongan orang yang sudah dikenakan kewajiban mereka terkena penghalang kecakapan (*ahliyah*) golongan *safih* (bodoh) yang harus mendapatkan sanksi hukuman sampai habis hukumannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun untuk menghilangkan hak politiknya penulis merasa tidak perlu, apabila dia sudah bertaubat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apalagi ditambah



dengan peraturan tambahan dalam UU Pemilu tentang pengumuman calon legislatif mantan narapidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

Kemudian alasan kedua yakni menggolongkan mantan koruptor tadi menjadi golongan yang terkena penghalang kecakapan jahil. Jahil adalah ketidaktahuan tentang adanya suatu hukum karena bisa jadi ketika dia melakukan perbuatan korupsi, dia tidak mengetahui hal hal (misal tentang administrasi) yang menjadikannya terkena tindak pidana korupsi. Dan jika benar hal demikian, maka seorang tersebut tidak dapat dihukum selamanya termasuk dengan menghilangkan hak politik.



Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar bertaubat. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa.

Dalam aturan konstitusi yang berlaku di Indonesia, putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 yang membolehkan mantan koruptor sebagai anggota legislatif, Mahkamah menilai peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum dan undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan serta telah

melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945.

Menurut penulis, dari penjelasan diatas dapat dipetik satu hal bahwa putusan Mahkamah Agung No.46p/Hum/2018 telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan koruptor untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara.

Sebab tujuan pemidanaan adalah membebaskan narapidana secara mental dan spiritual. Dengan tujuan pembebasan tersebut narapidana seolah-olah mengalami kelahiran kembali secara mental dan spiritual dan akan melepaskan segala cara berpikir, kebiasaan, dan gaya kehidupan yang lama. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian seorang mantan narapidana koruptor boleh menjadi anggota legislatif.

Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 yang memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sudah tepat dengan konstitusi yang ada di Indonesia sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun dalam putusannya, tidak sepenuhnya menjamin bahwa mantan koruptor tersebut dapat mengulang kejahatannya kembali, untuk lebih baiknya, kedepan Undang-undang Pemilu

harus diperbaharui terlebih mengenai larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Agar ada aturan yang jelas dan tidak menjadi polemik yang berkelanjutan di masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No.46P/Hum/2018 yang mengabulkan uji materiil tentang peraturan tersebut dan menimbulkan akibat hukum diperbolehkannya mantan koruptor untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif sesuai dengan UU Pemilu, dengan dasar pertimbangan, Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni pada UUD 1945 yakni pada pasal 28, peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan pasal 73 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g yang berbunyi:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Keputusan yang membatalkan peraturan KPU adalah agar terdapat kepastian hukum dalam negara yang berasaskan hukum. Oleh karenanya putusan Mahkamah Agung telah mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Berdasarkan kajian hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46p/Hum/2018 yang memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan sebagai anggota legislatif adalah sejalan dengan konsep Islam yang mencangkup hak-hak umat. Sebab mantan koruptor juga termasuk umat yang harus dilindungi hak-haknya apabila telah bertaubat. Sekalipun kecakapannya (*ahliyah*) pernah terhalang akibat kebodohan (*safih*) atau jahil akibat perbuatan yang diperbuatnya. Namun disamping itu, Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang berlandaskan kepada hukum (*hukum positif*). Dan juga dalam konstitusi di Indonesia rumusan Peraturan KPU tidak sesuai dengan hierarki yang ditentukan dalam undang-undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu Peraturan KPU ini pula bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 tentang hak dasar seseorang di bidang politik. Pembatasan hak politik seseorang seharusnya dimuat di dalam undang-undang bukan peraturan dibawah undang-undang Oleh sebab itu, walaupun KPU memiliki semangat untuk memberantas korupsi dilingkungan para wakil rakyat hal ini tetap harus berlandaskan kepada undang-undang yang lebih tinggi. Maka putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah selayaknya diberlakukan.



## **B. Rekomendasi**

1. Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 yang membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga negara yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan uraian diatas maka, sudah seharusnya undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk segera di revisi oleh lembaga pembentuk undang-undang serta mensyaratkan bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon wakil rakyat. Agar pelaksanaan pemilihan umum pada masa yang akan datang mampu menghadirkan para wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga pemilihan umum mampu terlaksana lebih sempurna sesuai dengan asas, langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Farid , *Fikih Politik Islam*. Jakarta:Amzah, 2005.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam* Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Al Awasim , *Alquran Tajwid Kode Tranliterasi Perkata Terjemah Perkata* Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika : 2011.
- Asshiddiqie, Jimly , *Pengantar Hukum Tata Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azra, Azyumardi , *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* , ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dahlan Thaib, Jazim Hamadi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* ,Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- El Muhtaj, Majda , *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT Rajawali Pers , 2008.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* ,Yogyakarta : FH UII Press, 2007.
- Kasim, Ifdhal , *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001
- Kautur, Ranny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi* , Bandung : Taruna Grafika 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koto, Alaidin , *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahfud, Moh , *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* ,Jakarta: Rajaawali Pers, 2011.
- Rahman Dahlan, Abd . *Ushul Fiqh* ,Jakarta: Amzah, 2014

- Rajab, Dasril , *Hukum Tata Negara Indonesia* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Riyanto, Astim *Teori Konstitusi* ,Bandung: Yapemdo, 2000.
- Saefuddin, A.M, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim* ,Jakarta, gema insani press, 1996
- Salim, Abd Muin, *Fiqh Siyasah, : Konsepsi Kekuatan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1995, Cet II.
- Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Syafiie, Inu Kencana , *Ilmu Politik* ,Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Syarif, Mujar Ibnu , *Hak –hak politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung : Angkasa, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 2000.
- Tim Pengajar HTN FH Unila, *Hukum Tata Negara* ,Bandarlampung: Justice Publisher, 2014.
- Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Bekasi: Sinar Grafika Offset , 2005.
- Wahyudi, Alwi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Y Yubsir, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Al Adalah, Vol 11, 2013, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 242. (on-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/doi.org/10.24042/adalah.v11i2.265> (22 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

“Survey LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan terendah”,  
(On-line)  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah?page=all>  
(20 Juni 2011).

